



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2003 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa arah dan kebijakan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang ditempuh selama ini perlu dilanjutkan dan disempurnakan agar peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan makin nyata dan merata dirasakan oleh seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat sekaligus meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya;
 - b. bahwa untuk menjamin kesungguhan Kepala daerah beserta Perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dibebankan, disusun Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat yang memuat kebijakan dan program strategis dimaksud untuk pencapaian tujuan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Negara Nomor 4025);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENACANA STRATEGIS DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2003-2008

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi /Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah propinsi Nusa Tenggara Barat.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- f. Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan serta pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- i. Rencana Strategis Daerah adalah Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008

Pasal 2

Rencana Strategis Daerah merupakan landasan dan Pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta perangkatnya dalam melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya

Pasal 3

Rencana Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN KEWENANGAN PROPINSI
SEBAGAI DAERAH OTONOM

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR
PENENTU KEBERHASILAN

BAB V PENENTUAN DAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Sistematika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam Lampiran Peraturan Daerah sebagai Naskah Rencana Strategis Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan, searah dengan penyempurnaan dan sinkronisasi Pola Dasar Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan Program Pembangunan Lima Tahun Daerah

Pasal 6

Hal-hal yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 desember 2003

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram.
pada tanggal 20 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT,**

NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2003
NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2003 - 2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era global, menguatnya tuntutan reformasi dan adanya komitmen politik untuk menerapkan otonomi daerah yang memberi kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah, termasuk bagi daerah Nusa Tenggara Barat untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera yang didukung oleh prinsip-prinsip moralitas yang kuat.

Globalisasi dan otonomi daerah yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar negara dan daerah dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap mengacu pada kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, harus berani menggeser dan memberi perhatian pada pengembangan paradigma baru pembangunan, yaitu paradigma administrasi publik dan paradigma baru pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah yang selama ini berperan dominan selaku dan pendorong utama pembangunan melalui instrumen kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting), harus mampu digeser perannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Dengan demikian akan terbangun pola-pola pemberdayaan dan partisipasi untuk meningkatkan daya saing masyarakat agar mampu berkompetisi di lingkup regional, nasional maupun global.

Dalam kontes tersebut maka untuk mencapai visi lima tahun kedepan, pol pengelolaan pemerintahan yang amanah (*Good Governance*) dan menitikberatkan pada pembangunan berbasis masyarakat (*Community based development*) yang meletakkan masyarakat pada posisi strategis sebagai subyek yang menentukan keberhasilan pembangunan menjadi sangat relevan. untuk itu, dibutuhkan terobosan melalui upaya-upaya mengembangkan pola pikir yang maju, mandiri dan religius serta pola hidup yang adil, demokratis dan sejahtera. Fokus dan orientasi pembangunan Nusa Tenggara Barat harus dititikberatkan pada pembenahan etika moral dan akhlak yang berjalan seiring dengan pembangunan yang bersifat fisik.

Orientasi tersebut tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta sosiologis. Secara fisik, letak geografis Provinsi Nusa Tenggara barat berada pada posisi sangat strategis dalam simpul pengembangan ekonomi Kawasan timur Indonesia. Selain itu , potensi sumber daya alam yang dimiliki Nusa Tenggara Barat merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial menghasilkan

produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan yang komparatif maupun kompetitif. dari aspek sosial, Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dan keanekaragaman sumberdaya sosial, yang apabila dikelola dengan baik akan memiliki daya saing tinggi dan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Jika potret pembangunan Nusa Tenggara barat selama ini, harus diakui bahwa ditengah keberhasilan pembangunan yang telah dicapai terdapat pula kelemahan-kelemahan. Di bidang pendidikan, masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan, beroreantasi pada pengembangan pribadi, watak serta pengetahuan dan ketrampilan peserta didik, yang berdampak pada kurang tumbuhnya kemandirian, kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Selanjutnya di bidang kesehatan, masalah yang dihadapi antara lain masih belum optimalnya akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, kasus kurang gizi pada kelompok penduduk usia di bawah lima tahun, yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat rendah. Karena itu diperlukan upaya pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah dan swasta, yang didukung oleh peranserta masyarakat dan sistem pembiayaan yang sesuai dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, lambatnya pengembangan pembangunan daerah juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kualitas tenaga kerja, lemahnya penegakan hukum, dan masih adanya kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang belum diselesaikan secara tuntas.

Walaupun konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah diletakkan sebagai kebijakan pembangunan daerah, namun implementasinya selama ini justru terjadi pengelolaan sumber daya alam yang kurang terkendali. Hal ini berakibat pada kerusakan lingkungan dan mengganggu kelestarian alam, yang pada akhirnya mengurangi daya dukung lingkungan terhadap pembangunan. Secara kumulatif, berbagai aspek ini telah berimplikasi pada rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibanding IPM daerah lainnya di Indonesia.

Dengan melakukan analisis terhadap situasi tersebut, maka prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis daerah (RENSTRADA) Nusa Tenggara barat ini adalah keserasian pembangunan non fisik dan fisik untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dalam lingkup regional, nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara barat dalam melaksanakan amanat rakyat yang diemban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, merumuskan Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan-kegiatan daerah yang bersifat strategis.

Ada beberapa aspek yang menjadi acuan dalam pentusunan Renstra ini, yaitu :
pertama : *modal dasar*, berupa potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, IPTEK dan peraturan perundangan; kedua : *lingkungan strategis*, internal maupun eksternal berupa permasalahan, tantangan dan peluang yang ada; serta ketiga : *instrumen input*, berupa kewenangan yang dimiliki serta kebijakan nasional dan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 adalah untuk memberikan arah kepada Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan strategi pembangunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2003-2008.

Adapun tujuan penyusunan Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 ini adalah :

1. Terformulasinya kebijakan, program dan kegiatan daerah yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pembangunan di Nusa Tenggara Barat secara holistik, komprehensif dan konsisten terfokus pada pencapaian visi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan dokumen untuk menentukan arah dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2003-2008.
3. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dan program strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan utama (ultimate goal) yang ditentukan dalam visi dan misi.
4. Sebagai acuan dan tolok ukur penilaian kinerja Gubernur Nusa Tenggara barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

C. Pendekatan Penyusunan dan Lingkup Pembahasan Renstra

Penyusunan Renstrada ini selain menggunakan pendekatan yang berlaku umum bagi setiap organisasi, juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam proses penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

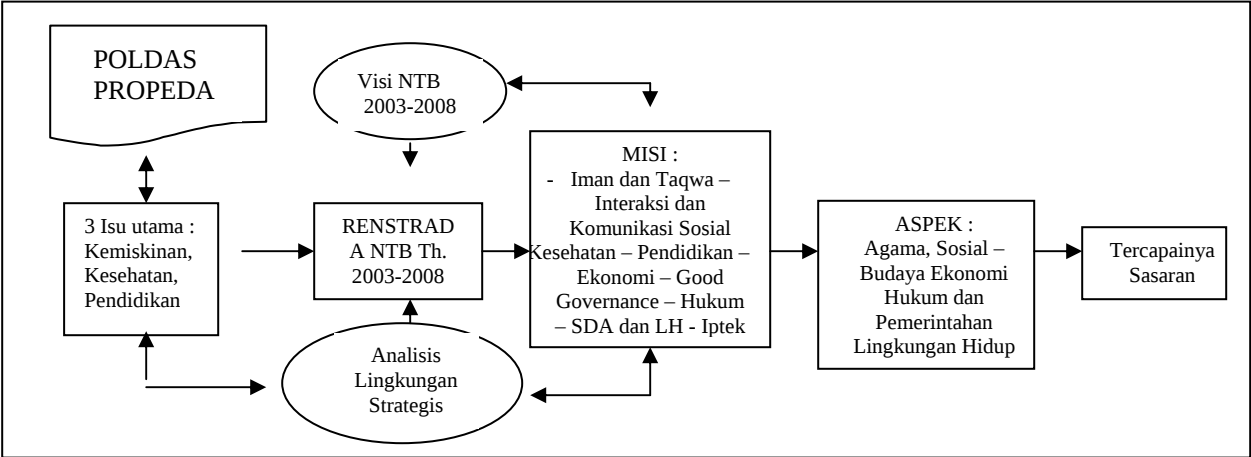
Dalam Penterjemahan visi kedalam misi, dilakukan diskusi mendalam tentang berbagai isu mendasar atau persoalan pokok yang masih dihadapi daerah Nusa Tenggara Barat yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Dilakukan pula pencermatan lingkungan strategis melalui SWOT Analysis, yaitu pencermatan lingkungan internal berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta pencermatan lingkungan eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Sebagai Dokumen Perencanaan Strategis, Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 memuat program-program kegiatan pokok yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan, untuk mengatasi tiga isu strategis, yaitu :

- a. Peningkatan penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan derajat kesehatan
- c. Peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif lingkungan strategis maka pola pikir penyusunan Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :

KERANGKA PIKIR RENSTRADA NTB 2003-2008



D. Gambaran Umum Nusa Tenggara Barat

1. Letak Geografis

Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 120.153,15 km² terdiri dari pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,50 km² (76,49%) . Dari aspek georafis, NTB mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan darat dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) serta terletak dalam segitiga emas daerah tujuan wisata utama indonesia. Hal ini merupakan peluang investasi jangka panjang. Secara administratif meliputi 6 Kabupaten dan 2 Kota, 98 Kecamatan, 76 Kelurahan dengan 453 Lingkungan, 576 Desa dengan 3.206 Dusun.

2. Penduduk

Penduduk Nusa Tenggara Barat thun 2002 berjumlah 4.127.519 jiwa dengan kepadatan mencapai 205 jiwa per km² (BPS 202). Jumlah rumah tangga miskin yang ada di NTB pada tahun 2002 tercatat sebanyak 282.557 (27,75%). Bila dibandingkan dengan tahun 1996 dan 1999 jumlah rumah tangga miskin terlihat fluktuatif sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Rumah Tangga Miskin di NTB

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	Rumah Tangga Miskin
1	1996	863,484	276.054 (31,97%)
2	1999	952.760	313,933 (32,95%)
3	2002	1.018.227	282,557 (27,75%)

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

Dari aspek ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kegiatan utama adalah sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 1999 dan 2002

Kegiatan Utama	1999	2002
Angkatan Kerja	1.779.233	1.892.760
- Bekerja	1.695.595	1.803.254
- Mencari pekerjaan	83.638	89.506
Bukan Angkatan Kerja	730.535	844.420
- Sekolah	152.593	190.508
- Mengurus Rumah Tangga	429.684	486.944
- Lainnya	1.018.22148.2587	166.968
		2.737.180

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

Sedangkan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2002 sebesar 69,16%, menurun dibandingkan tahun 1999 yang sebesar 70,89%. Secara rinci sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Jenis Kelamin di NTB, Tahun 1999 dan 2002

TPAK	1999	2002
Laki-laki	85,34%	85,34%
Perempuan	58,19%	55,38%
Total	70,58%	69,15%

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB per kapita di NTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 1997-2002 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 27,49% dari Rp. 1.208.115,- tahun 1997 menjadi Rp. 2.868.854,- tahun 2002. Nilai pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih nyata yang diperoleh dari PDRB per kapita ADHK sebesar 1,23% dari Rp. 866.016,- tahun 1997 menjadi Rp. 919.457 tahun 2002.

PDRB per kapita Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1997 – 2002 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
PDRB Perkapita Propinsi NTB Tahun 1997 – 2—2

Tahun.	PDRB Perkapita (Rp)		Perubahan (%)	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1997	1208115	896147	-	-
1998	1976504	853498	63,60	(-) 4,76
1999	2140502	879721	6,87	0,39
2000	2312981	885976	8,06	0,71
2001	2600680	901227	12,44	1,72
2002*)	2852935	919457	9,71	2,03

Sumber : BPS Prop. NTB 2003
*) Angka Sementara

4. Pendidikan

Penduduk umur 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2002 sekitar 21,73 % dan angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 1999 sebesar 27,17%. Angka Buta Aksara di pedesaan lebih tinggi (sekitar 30%) dibanding perkotaan (10-15%). Persentase Angka Melek Huruf masing-masing Kabupaten/Kota se Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Persentase Penduduk NTB Kelompok Umur 15 Tahun keatas
Yang Melek Huruf, Tahun 1999 – 2002

Kabupaten/Kota.	Angka Melek Huruf (%)				
	1996	1999	2000	2001	2002
Lobar	58,40	63,80	63,09	70,88	72,84
Loteng	52,46	64,43	65,19	65,27	68,36
Lotim	66,50	68,61	75,24	76,07	76,33
Sumbawa	81,74	84,70	87,00	88,46	88,66
Dompu	80,09	81,99	84,05	84,92	85,16
Bima	80,46	81,79	80,40	80,41	82,16
Mataram	82,96	87,76	83,23	87,28	91,96
NTB	67,98	72,76	76,32	77,29	78,27

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2002 sebesar 6,25 tahun. Rincian rata-rata lama sekolah masing-masing Kabupaten/Kota se Propinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2002

Kabupaten/Kota.	Rata-rata Lama Sekolah (%)				
	1996	1999	2000	2001	2002
Lobar	3,40	3,99	4,19	5,05	5,18
Loteng	3,40	4,31	4,64	5,08	5,25
Lotim	4,30	4,79	5,67	6,00	6,21
Sumbawa	5,30	6,03	6,53	6,76	7,10
Dompu	6,60	6,03	6,62	6,36	6,68
Bima	6,10	6,46	6,59	6,64	6,95
Mataram	7,20	7,87	7,98	8,30	8,41
NTB	4,60	72,82	5,61	6,40	6,25

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

5. Kesehatan

Dukungan pelayanan dan prasarana kesehatan masyarakat sampai dengan 2002 antara lain: Rumah Sakit Umum 6 unit, Rumah Sakit Jiwa 1 unit dan Rumah Sakit Kusta 2 unit, Puskesmas 124 unit, Puskesmas Pembantu 435 unit, Puskesmas Keliling 131 unit, dengan tenaga medis terdiri dari : Dokter Ahli 62 orang, Dokter Umum 341 orang, Dokter Gigi 85 orang, sedangkan tenaga paramedis yaitu paramedis perawat 2.625 orang, Non Perawat 1.419 orang.

Rata-rata lama sakit penduduk tahun 1999 selama 6,46 hari menjadi 6,47 hari pada tahun 2002, jauh lebih lama dari angka nasional 4 hari. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut :

Tabel 1.7
Rata-rata Lama Sakit Penduduk NTB, 1999 dan 2002

No.	Kabupaten/Kota	1999 (hari)	2002 (hari)
1	Lobar	6,93	6,77
2	Loteng	7,17	6,77
3	Lotim	5,07	6,36
4	Sumbawa	6,39	5,79
5	Dompu	6,70	6,76
6	Bima	7,09	6,29
7	Mataram	5,24	6,32
	NTB	6,46	6,47

Sumber : BPS Prop. NTB 2003

6. Agama

Jumlah sarana peribatan tahun 2002 mencapai 4.361 Masjid, 44 Gereja, 388 Pura dan 28 Vihara, sedangkan jumlah yang menunaikan ibadah haji tahun 2002 mencapai 4,548 orang, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan sebanyak 230 lembaga. Jumlah Pondok Pesantren mencapai 294 buah.

7. Potensi Sumber Daya Alam

a. Sumber daya Lahan

Potensi sumber daya lahan terdiri dari potensi pertanian yang meliputi lahan tanaman pangan seluas 583.432,256 Ha, telah dimanfaatkan seluas 310.969 Ha (53,30 %) ; lahan perkebunan seluas 665.314 Ha, telah dimanfaatkan seluas 185.849,14 Ha (27,93%)

Selain itu potensi wilayah perairan umum untuk perikanan air tawar seluas 10.027,30 Ha. Sedangkan potensi luas areal pengembangan perikanan budidaya laut payau seluas 42.595 Ha, dan telah dimanfaatkan seluas 6.528 Ha (15%).

b. Sumber daya Hutan

Potensi sumberdaya kehutanan mencakup keanekaragaman potensi biota dengan luas areal 1.262.905 Ha dan telah dimanfaatkan seluas 1.100.896,84 Ha terdiri dari Hutan Lindung 630.255 Ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata 133.182,34 Ha, Hutan Produksi Terbatas 133.511 Ha dan Hutan Bakau 203.948,50 Ha.

c. Sumber daya Air

Potensi sumberdaya air di NTB sebesar 3.042,55 mcm yang terdapat di Pulau Lombok dan sebesar 7.705,58 mcm di Pulau Sumbawa. Data neraca sumberdaya air di Satuan Wilayah Sungai (SWS) Lombok dan SWS Sumbawa, diketahui kebutuhan air di Pulau Lombok 3.849 mcm, sedangkan kebutuhan air untuk Pulau Sumbawa 2.977,02 mcm.

d. Sumber daya Mineral

Potensi sumberdaya mineral mencakup berbagai jenis komoditi mineral dibagi dalam Golongan A, B dan C, yang mempunyai potensi ekonomis, sebagai berikut : emas 401,655 ton, tembaga 4,7 ton, pasir kuarsa 2,5 juta ton, batu silika 3,77 juta ton, kalsit 8,85 juta ton, batu apung 9,1 juta ton, bau kapur 241,5 juta M3, marmer 33,7 M3, tras 301,4 juta M3, tanah liat 135,13 juta M3, perlit 1,0 juta ton, batu bangunan (andesit, deorit, dasit) 543 juta M3, sirtu 8,0 juta M3, zeolit 207 ribu ton, belerang 20,2 ribu ton, dan pasir besi 20,28 ton. Sedangkan potensi panas bumi terdapat di Sembalun dan Maronge serta Hu'u dan potensi tenaga air di Kokok Putek 7,5 MW, Sungai Sembalun 20,4 MW, Sungai Muntur 2,8 MW, Brang Beh 103,5 MW, rang Rhee 16 MW.

8. Potensi Pariwisata

Pemerintah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan kawasan pengembangan pariwisata sebanyak 15 kawasan, 9 kawasan terdapat di Pulau Lombok dan 6 kawasan terdapat di Pulau

Sumbawa. Kawasan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok terdiri dari : Kawasan Senggigi dan sekitarnya (dsk), Gili Gede dsk, Suranadi dsk, Pantai Kuta dsk, Silong Belanak dsk, Sade dsk, Gili Indah dsk, Gunung Rinjani dsk, Gili Sulat dsk,. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 6 kawasan yaitu : Pulau Moyo, Pantai Maluk, Pantai Hu'u, Tambora, Teluk Bima dan Sape dsk.

9. Hukum

Selama lima tahun terakhir, telah ditetapkan 50 Peraturan Daerah Propinsi , 2.423 Keputusan Gubernur, 27 Instruksi Gubernur, terselesaikannya 33 kasus sengketa hukum dan 32 kasus non yustisial. Selain itu telah terlaith 50 orang PPNS pada lingkup Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

10. Infrastruktur

Sampai tahun 2002 panjang jalan mencapai 7.279,48 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 541,23 km, jalan provinsi 1.870,16 km dan jalan Kabupaten/Kota 4.868,09 km, dengan tingkat kemantapan rata-rata 48,05%.

Insfrastruktur lainnya terdiri meliputi : tujuh pelabuhan laut utama (Lembar, Kyangan, Pototano, Badas, Bima, Sape, dan Calabai); tiga pelabuhan udara (Selaparang, Brangbiji, M. Salahuddin). Selain itu terdapat pula fasilitas telepon sejumlah 52.788 kapasitas telepon, dan daya terpasang listrik sejumlah 179,328 Mega Watt.

E. Isu Strategis

Memperhatikan kondisi umum dan potensi yang ada, terdapat beberapa isu strategis yang perlu dikaji untuk dapat menentukan arah kebijak, program kegiatan yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Isu strategis yang utama dan menjadi prioritas untuk diatasi yakni berkaitan dengan tiga komponen yang menyebabkan rendahnya posisi Nusa Tenggara Barat secara nasional dalam indeks pembangunan manusia (IPM), yakni rendahnya tingakt pendapatan perkapita, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan rata-rata penduduk.

Secara umum, beberapa isu strategis dapat dikelompokkan dalam lima aspek sebagai berikut :

1. Agama

Masalah mendasar dari aspek kehidupan beragama adalah belum insentifnya komunikasi antar umat beragama maupun intern umat beragama serta antar kelompok masyarakat. Hal ini merupakan satu faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Jika komunikasi ini dapat dibangun dengan baik akan mampu melahirkan sinergi yang mendorong percepatan pembangunan. Kedepan masyarakatlah yang menjadi subyek pembangunan, pemerintah lebih berperan sebagai *fasilitator, regulator dan dinamisator*.

2. Sosial – Budaya

Isu-isu strategis yang terkait dengan masalah soail budaya antarlain masih rendahnya kualitas dan pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, serta belum efektifnya komunikasi dan interaksi sosial.

Pada sektor pendidikan, masalah mendasar yang perlu mendapat perhatian serius adalah rendahnya kemampuan, keadilan pemerataan memperoleh pendidikan. Pada tahun 1999, angka melek huruf mencapai 72,8% dan angka rata-rata lama sekolah 5,2 tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar 88,4% untuk melek huruf 6,7 tahun untuk rata-rata lama sekolah (BPS, BAPPENAS, UNDP, 2001). Kondisi tahun 2002 angka melek huruf mencapai 78,27% dan angka rata-rata lama sekolah 6,25 tahun. Walaupun telah terjadi peningkatan namun masih berada dibawah angka rata-rata nasional, sehingga diperlukan kerja keras seluruh masyarakat dan pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Propinsi untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan.

Pada sektor kesehatan, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain angka kematian bayi (AKB) dan angka usia harapan hidup (UHH) rata-rata penduduk Nusa Tenggara Barat, tercatat masing-masing 81 per 1000 kelahiran dan 57,8 tahun pada tahun 1999. Sementara AKB dan rata-rata UHH secara nasional mencapai 46 per 1000 kelahiran dan 66,2 tahun pada waktu yang sama

Dari aspek budaya, masih dirasakan belum efektifnya jalinan interaksi dan komunikasi sosial serta kerjasama lintas budaya dalam rangka mewujudkan keutuhan masyarakat yang semakin mantap dan harmonis.

3. Hukum dan Pemerintahan

Permasalahan pada aspek hukum adalah masih lemahnya penegakan hukum dan HAM. Sedangkan pada aspek pemerintahan, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam mengambil kebijakan publik. Upaya penegakan hukum dan HAM yang sungguh-sungguh dan mewujudkan Good Governance akan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan upaya mewujudkan Good Governance, perlu dilakukan rasionalisasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Masalah lain adalah masih lemahnya sistem maupun kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi untuk mampu merumuskan kebijakan yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan.

Sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara kelompok masyarakat juga merupakan salah satu faktor penentu dalam membangun keutuhan dan kemandirian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu menjadi tugas Pemerintah Propinsi untuk menciptakan suasana yang kondusif guna terjalinnya dialog dan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

4. Ekonomi

Isu strategis pada aspek ekonomi adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang ditandai oleh tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan isu utama

untuk ditangani selama kurun waktu lima tahun kedepan, jumlah rumah tangga miskin yang ada di NTB pada tahun 2002 tercatat sebanyak 282,557 (27,75%).

Tingginya angka kemiskinan dari sisi ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya sarana prasarana produksi, akses permodalan dan ketersediaan lapangan kerja yang dapat memberikan sumber pendapatan untuk kehidupan yang layak.

5. Lingkungan Hidup

Saat ini terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditandai oleh semakin luasnya lahan kritis akibat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan . Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya kualitas sumberdaya air maupun sumberdaya flora dan fauna . Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pelibatan masyarakat ,serta peningkatan kapasitas dan peran aparatur dalam pengawasan.

BAB II

KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

A. KEWAJIBAN KEPALA DAERAH

Kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 43 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, adalah :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
2. Memegang teguh Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
3. Menghormati kedaulatan rakyat;
4. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
7. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD.

Selain itu, dalam Pasal 44 dan 45 disebutkan bahwa :

1. Kepada Daerah memimpin Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban nya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD.
3. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ,sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden .

4. Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran .
5. Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD.
untuk hal tertentu atas permintaan DPRD.

B. KEWENANGAN PROVINSI

Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai pemerintah Otonom, mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan ;yang bersipat lintas Kabupaten/Kota serta Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, seperti : perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro ;pelatihan bidang tertentu ;alokasi sumber daya manusia potensial;penelitian yang mencakup masalah provinsi ; pengelolaan pelabuhan regional;pengendalian lingkungan hidup;promosi dagang dan budaya/pariwisata;;penangan penyakit menular dan hama tanaman ;dan perencanaan tata ruang Provinsi.

Selain kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu tersebut, Provinsi juga memiliki 20 kewenangan bidang, sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
4. Bidang Pertambangan dan Energi
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Ketenag Kerjaan
9. Bidang Kesehatan
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
11. Bidang Sosial
12. Penataan Ruang
13. Bidang Pemukiman
14. Bidang Pekerjaan Umum
15. Bidang Perhubungan
16. Bidang Lingkungan Hidup
17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
19. Bidang Perimbangan Keuangan
20. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Berdasarkan mandat konstitusi yang merupakan manifestasi amanat rakyat, bahwa masa depan kehidupan masyarakat diarahkan pada terwujudnya suatu keadaan yang lebih dari keadaan masa kini ditinjau dari aspek ;keutuhan negara,implementasi idiologi dan dasar negara,penghormatan terhadap kedaulatan rakyat,penegakan hukum,taraf kesejahteraan serta keamanan dan ketertiban .

Kebutuhan Pembangunan terasa sekali betapa mendesaknya keharusan mengerahkan daya upaya untuk menuju suatu kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sehubungan dengan itu , visi pembangunan Nusa Tenggara Barat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman ,takwa maju ,adil,sejahtera dan demokratis serta mandiri“

Dalam rumusan visi tersebut,terkandung makna :

- Pertama , “beriman taqwa “ menggambarkan situasi dan kondisi penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang terwujud dalam masyarakat silaturahmi yang memiliki sikap menjunjung kerukunan hidup antar internal umat satu agama dan antara umat satu agama yang satu dengan umat agama lain, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, peduli serta jujur.
- Kedua, “maju” menggambarkan kondisi dan situasi yang masyarakat yang mau dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari guna bergerak menuju suatu kehidupan yang semakin baik tanpa dibatasi dimensi waktu.
- Ketiga, “adil” bermakna masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, mudah, merata dan tidak diskriminatif sesuai hukum positif dan norma-norma sosial.
- Keempat, “sejahtera” mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak serta kesempatan kerja dan usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Kelima, “demokratis” berarti makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.
- Keenam, “mandiri” mengandung makna kemampuan masyarakat untuk membangun sinergi baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya guna membangun keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Dengan demikian, makna filosofis rumusan visi tersebut adalah kehendak masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat NTB yang beriman taqwa, maju dan sejahtera dengan mengembangkan kemandirian, keadilan dan demokrasi dalam bingkai NKRI.

B. MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Barat, maka dirumuskanlah misi yang dapat diemban dalam periode 2003-2008 sebagai berikut :

1. Meningkatkan iman dan taqwa serta silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari
2. Meningkatkan kemampuan interaksi dan komunikasi sosial dalam rangka mewujudkan keutuhan masyarakat
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kemampuan, keadilan dan pemerataan pendidikan
5. Meningkatkan kemampuan dan keadilan ekonomi masyarakat
6. Mendorong penerapan prinsip-prinsip good Governance dan memperkuat struktur politik
7. Mendorong pengembangan hukum daerah, baik dalam substansi, struktur maupun kultur yang berorientasi pelayanan
8. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
9. Mendukung usaha dan penerapan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan fungsi lingkungan.

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Analisis lingkungan penting untuk dilakukan, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah selalu berhubungan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola lingkungannya. Analisis lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu Analisis Lingkungan Internal dan Analisis lingkungan Eksternal.

A. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal terdiri dari dua faktor, yaitu kekuatan dan kelemahan. Analisis Lingkungan Internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (strength) dan faktor kelemahan (weakness). Analisis ini dilakukan untuk dapat merumuskan dan menentukan strategi yang tepat.

Kekuatan-kekuatan yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya secara partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek

pembangunan, sedangkan pemerintah lebih sebagai fasilitator, dinamisator dan regulator merupakan kekuatan utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Di samping itu, dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan, sebagai program utama pembangunan daerah merupakan cara tepat dalam menyelesaikan persoalan dasar.

bertitik tolak dari tiga isu tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode 2003-2008 mencanangkan komitmen menuju perubahan yakni Melangkah Maju Untuk Kesejahteraan Bersama.

Motto ini diharapkan dapat menggerakkan semangat dan daya pacu dalam pelaksanaan pembangunan, yang juga berfungsi sebagai pendorong bagi gerakan pembangunan di Kabupaten/Kota.

2. Adanya Dukungan Pimpinan Informal, perguruan Tinggi dan LSM

Dukungan dan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya, merupakan kekuatan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Pendekatan terhadap tokoh informal dari waktu ke waktu perlu terus dikembangkan, sehingga makin memperkuat dukungan pembangunan dan stabilitas politik dan sosial.

Pengalaman perguruan tinggi dalam bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan pengkajian yang terkait dengan masalah-masalah pembangunan dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan dapat dijadikan masukan dalam menentukan dan merancang model pendekatan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tumbuh kembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan berbagai kegiatannya didalam penguatan kelembagaan lokal, pemberdayaan masyarakat, advokasi demokrasi, konservasi sumber daya alam dan lingkungan merupakan potensi yang besar dalam mendukung pembangunan. Pengalaman empiris dalam pengembangan masyarakat dapat menjadi modal bagi upaya mempercepat proses perubahan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan LSM dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maka tujuan membangun masyarakat maju dan sejahtera akan dapat diwujudkan.

3. Tersedianya SDM Aparatur yang Jumlahnya Cukup Memadai

Mayoritas SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendidikan SLTA, yaitu sejumlah 5.208 orang (44,57%). Selebihnya berpendidikan SD sejumlah 298 orang (5,72%), SLTP sejumlah 180 orang (3,46%), Sarjana Muda/D-3 sejumlah 494 orang (9,49%), S-1 sejumlah 1.717 orang (32,97%), S-2 sejumlah 195 orang (3,74%) dan S-3 sejumlah 3 orang (0,05%).

Data selengkapnya tentang SDM Aparatur pada lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pada masing-

masing kelompok satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Jumlah PNS Pada Pemerintah Provinsi NTB
Menurut Golongan/Ruang-Keadaan Per Agustus 2003

NO	KELOMPOK SATUAN KERJA	JML TOTAL	GOLONGAN/RUANG PNS																				
			I					II					III					IV					
			a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e	Jml
I	DINAS DAERAH	3331	3	5	36	40	84	209	190	287	322	1008	604	735	604	374	2022	122	69	21	5	0	217
2	BADAN (LTD)	1208	0	2	1	7	10	73	55	114	111	353	219	206	219	152	716	62	43	10	4	1	120
3	SETDA & SET DPRD	669	0	0	3	11	14	81	56	62	52	251	148	72	148	32	355	35	8	6	0	0	49
	Jumlah Total	5208	3	7	40	58	108	363	301	463	485	1612	971	1013	971	558	3093	219	120	37	9	1	386
	Persentase (%)	100					2,07					30,95					59,39						7,41

Sumber : Data pada Biro Kepegawaian Setda Prop. NTB

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah PNS Pada Pemerintah Provinsi NTB
Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan Per Agustus 2003

No	KELOMPOK SATUAN KERJA	PENDIDIKAN							
		SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1	S2	S3	JML
1	DINAS DAERAH	169	107	1457	322	1182	93	1	3331
2	BADAN (LTD)	64	31	558	122	353	78	2	1208
3	SETDA + SET DPRD	65	42	306	50	182	24	0	669
	Jumlah Total	298	180	2321	494	1717	195	3	5208
	Persentase (%)	5,72	3,46	44,57	9,49	32,97	3,74	0,05	100

Sumber : Data pada Biro Kepegawaian Setda Prop. NTB

4. Tersedianya Aset daerah

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah yang diikuti dengan penyerahan P3D (peralatan, pendanaan, pembiayaan dan dokumen) maka aset yang tadinya merupakan milik pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aset tersebut berupa tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, ternak, tumbuhan dan lain-lain senilai Rp. 2.030.520.158.136,11.

Jumlah aset yang dimiliki daerah menggambarkan cukup besarnya potensi Pemerintah Provinsi NTB yang memungkinkan untuk mendukung terwujudnya tujuan mencapai masyarakat maju dan sejahtera.

5. Tersedianya Legalitas Yuridis Manajemen Pemerintahan

Legalitas yuridis untuk mengelola aktivitas pemerintahan, seperti Peraturan Pemerintah No. 25/2000 merupakan otoritas yang kuat dalam rangka

mengoperasikan kewenangan Pemerintah Propinsi yang mencakup 21 bidang kewenangan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya ekonomi dan lingkungan. Secara makro kekuatan yuridis tersebut, mencakup antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan regional, alokasi sumber daya manusia potensial dan pengelolaan pelabuhan regional.

6. Tersedianya Sarana-Prasarana Sosial Dasar

kualitas infrastruktur seperti kualitas prasarana jalan dengan kualifikasi baik mencapai 62,65% dan secara nasional berada pada posisi terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Namun kondisi tersebut mengalami penurunan drastis karena pertumbuhan lalu lintas yang cukup tinggi dan muatan yang tak terkendali serta dipengaruhi oleh faktor umur rencana teknis jalan yang telah terlampaui. Kondisi tersebut terinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Panjang dan Kondisi Jalan Nasional dan Provinsi
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002

Status	Panjang (km)	Konstruksi (KM)			Kondisi (km)	
		Hotmix	Aspal Lapen	Sirtu/ Tanah	Mantap	Kurang Mantap
Nasional	541,23	541,23	0	0	342,75	198,48
Provinsi	1.865,26	797,78	604,42	282,26	757,53	1.107,73
Jumlah	2.406,49	1.339,01	604,42	282,36	1.100,28	1.306,21

Sumber : Data pada Biro Kepegawaian Setda Prop. NTB

Potensi sumber daya air Nusa Tenggara Barat sebesar 10.748,13 mcm, sedangkan kebutuhan air mencapai 6.826,22 mcm. Kondisi surplus ketersediaan air tersebut, akan lebih mantap dan stabil jika tersedia dukungan prasarana pengairan yang cukup memadai, sehingga distribusi air baku untuk kebutuhan irigasi, rumah tangga dan industri dapat terpenuhi. Ketersediaan prasarana pengairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Pengairan

di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002

Uraian	Satuan	Jumlah
Jumlah Sub SWS	Buah	18
Mata Air	Buah	169
Luas Sawah Irigasi	Ha	266.779
- Irigasi Pemerintah	Ha	170.580
- Irigasi Desa	Ha	90.613
- Irigasi Air Tanah	Ha	5.586
Tadah Hujan	Ha	13.008
Bendungan	Buah	7
Embung	Buah	161
Sumur Air Tanah	Titik	443

Sumber : dinas Kimpraswil Prov. NTB 2003

7. Tersedianya Potensi SDA, LH dan Produk Unggulan

Besarnya potensi sumber daya alam merupakan salah satu kekuatan yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh ketersediaan potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang selama ini masih memiliki daya ungkit tinggi untuk dikembangkan.

Selain potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terdapat pula produk-produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai kekuatan yang mampu mendorong percepatan ekonomi daerah, seperti bawang, kedelai, jagung, jambu mete, mutiara, rumput laut, sapi, kayu sengon, dan kayu jati.

8. Jumlah Tenaga Kerja Yang Besar

Besarnya jumlah penduduk terkait dengan angkatan kerja, yaitu pencari kerja dan penduduk yang sudah bekerja, disatu sisi merupakan modal dasar pembangunan, mengingat proporsi angkatan kerja merupakan proporsi yang tinggi dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Prospek kesempatan kerja yang ditunjukkan dengan permintaan tenaga kerja menduduki rangking keempat nasional setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja yang besar harus dapat ditingkatkan kualitas dan manajemen pengelolaannya untuk dapat mengisi permintaan tenaga kerja, baik didalam maupun diluar negeri.

9. Tersedianya Jumlah dan Jenis Teknologi Tepat Guna

Teknologi tepat guna yang telah dikembangkan dan diterapkan cukup banyak jumlah dan jenisnya. Berbagai keberhasilan dari teknologi tepat guna yang telah diterapkan oleh masyarakat telah mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi masyarakat dalam mengembangkan upaya yang mengarah pada kemandirian dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Beberapa contoh keberhasilan dari adanya berbagai jenis teknologi tepat guna yang telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain teknologi di bidang pertanian, perikanan industri kecil, dan beberapa teknologi yang mampu mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

10. Tersedianya Pranata Hukum dan Nilai Kearifan Lokal

Untuk mendukung proses pembangunan diperlukan kekuatan yang tumbuh secara genuine di tengah-tengah masyarakat, berupa aturan-aturan yang bersifat internal seperti awig-awig pengairan, awig-awig tanah pesisir adat, awig-awig hutan adat masyarakat dan lain-lain. Kearifan-kearifan lokal (Local Indigenous) ini menjadi kekuatan spesifik yang sudah berlaku, bahkan merupakan norma sosial yang kuat berlaku di masyarakat. Adanya sinergi kekuatan budaya dengan kemauan untuk membangun diri sudah tentu akan berdampak positif dalam mensukseskan segala aspek pembangunan.

Kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan dan suksesnya pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat di Propinsi NTB masih rendah, ditunjukkan oleh adanya beberapa indikator antara lain masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), rata-rata lama sakit penduduk, prevalensi beberapa penyakit menular serta rendahnya proporsi penduduk yang memanfaatkan sarana sanitasi yang baik.

AKB tahun 1999 mencapai 81 per 1000 kelahiran hidup, sementara secara nasional periode yang sama adalah 46 per 1000. Rata-rata lama sakit penduduk tahun 2002 adalah 6, 47 hari, sedangkan secara nasional rata-rata lama sakit lebih rendah yaitu 4 hari.

Prevalensi beberapa penyakit menular misalnya Malaria dan TBC masih menunjukkan angka yang tinggi. Angka kesakitan malaria tahun 2002 mencapai 25,8 per 1000, dengan tingkat kematian 2,4%. Untuk penyakit TBC 52,1 per 10.000 dengan angka kematian karena TBC tahun 2001 sekitar 2,3%. Pemanfaatan sarana sanitasi bagi penduduk masih rendah yaitu 50% pada tahun 2002.

2. Rendahnya Rata-rata Tingkat Pendidikan Penduduk

3. Rendahnya Pendapatan Perkapita dan Rendahnya Akses ke Sumber Modal

4. Lemahnya Komunikasi dan Interaksi Sosial

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan SDA dan LH

6. Lemahnya Penegakan Hukum

7. Lemahnya Penegakan Iptek Termasuk Akses, Kualitas Maupun Sistem Informasi

8. Penyelenggaraan Pemerintahan Kurang Berorientasi Pelayanan Publik

9. Lemahnya Komunikasi dan Koordinasi Internal Pemerintah Provinsi Maupun Antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Analisis Lingkungan External

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar rentang kendali (span of control) daerah,dan sulit untuk diramalkan sehingga membawa dampak yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam pembanguna daerah. Oleh karenanya perlu diperhatikan dan pencermatan yang serius terhadap aspek yang melingkupinya.Pada hakekatnya,lingkungan eksternal mengandung peluang (opportunitinties) dan ancaman (theats),yang akan mempengaruhi keberadaan dan gerak pembanguna daerah.

Adapun peluang-peluang yang diidentifikasi mempengaruhi keberhasilan dan suksesnya visi pembangunan daerah adalah sebagai :

1. Letak Geografis Yang Strategis

Posisi geografis NTB yang terletak pada kawasan segitiga emas pariwisata yaitu Bali – Toraja –Komodo dan alur laut Kepulauan Indodnesia (ALKI) serta lintas transportasi darat Aceh –Atambua merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan inpestasi.

Hal ini membawa dampak pada semakin lancarnya pelayanan arus barang dan jasa antar wilayah.Sedangkan dari aspek Perikanan dan Kelautan,terletak antar samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang dalam jangka panjang diprediksi akan terjadi pergeseran pusat kegiatan ekonomi global dari poros atlantik ke Pasifik (Pasifik Rim) yang akan memberi peluang bagi pengembangan ekonomi. Sealin itu,adanya kebijakan nasional dalam rangka percepatan Kawasan Timur Indonesia,jarak geografis NTB lebih dekat dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Surabay dan Makasar,dibandingkan dengan Propinsi lainnya yang ada diKawasan Timur Indonesia.

2. Kebijakan Otonomi Daerah

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

B. MISI

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

A. Analisis Lingkungan Internal

B. Analisis Lingkungan Eksternal

C. Analisis SWOT

D. Faktor Kunci Keberhasilan

BAB V
PENENTUAN DAN CARA MENCAPAI TUJUAN
DAN SASARAN

A. Tujuan

B. Sasaran

C. Kebijakan

D. Program dan Kegiatan

BAB VI
PENUTUP